

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku- buku

- Achmad Ruslan., Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Rangkang Education Press, Yogyakarta, 2013.
- Aminuddin, Ilmar, Memaknai Kepemerintahan Yang Baik, Phinata Media, Cetakan I, Makassar, 2020.
- Arief, Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2001.
- Assidiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsultasi lembaga Negara Pasca Amandemen, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Atmosudirdjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara di Indonesia, Jakarta, 1994.
- Azhari, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, Universitas Indonesia, UI Press, 1995.
- Aziz, Hakim, Abdul, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar Celeban Timur, Yogyakarta, 2011.
- Bakhri, Syaiful, Ilmu negara dalam Konteks Negara Hukum Moderen, Total Media, Yogyakarta, 2010.
- Buyung, Nasution, Adnan, Arus Pemikiran dan Konstitusionalisme Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, The University of Michigan, 2007.
- Buku Profil Anak Indonesia, Kerjasama KPPPA BPS RI, 2020.
- Dinstein, Yoram, Hak Atas Hidup, Keutuhan Jasmani dan Kebebasan dalam Hak Sipil dan Politik, Editor Idris Kasim, ELSAM, Jakarta, 2001.
- Elizabeth A Martin, A Dictionary of Law, Oxford University Press, New York, 2002.
- F.A.M. Stoinck dalam Abdul Rasyid Thlm. ib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fattah, Virgayani, Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan, Jurnal Yudika, Volume 32, Mei Tahun 2017.
- Handoyo, Eko, *Kebijakan Publik*, Cetakan I, Widya Karya, Semarang, 2012.
- Hingroni, Modern International Law, Oxford & IBH Publishing Co., New Delhi, 1982.
- Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, CV, Rajawali, Jakarta, 1991.

- I Gede Arya B Wiranata, Hak Asasi Anak Dalam Realitas Quo Vadis. Hak Asasi Manusia: Hakikat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Cetakan ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Iin Karita Sakharina, Kewajiban negara terhadap pemenuhan hak atas kecukupan pangan yang layak di Indonesia (Suatu tinjauan terhadap Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya), Cet I, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Effendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka harapan, Jakarta, 1993.
- J.A. Denny, Menjadi Individu tanpa diskriminasi, cetakan pertama, Gramedia, Jakarta, 2013.
- John Rawls, Teori Keadilan, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- J. Milton, Hans Wehr; A Dictionary of Modern Written Arabic (Wiebedan: Oto Harrassowitz, 1997), Dalam Mejda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Menguarai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Rajawali Press, Jakarta. Thomas Buergenthal. International Human Rights in Nutsbell, A Thomson Company, United State of America, 2002.
- Lilik Mulyadi, 2008. *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung.
- Lois Henking, The International Bill of Rights: The Universal Declaration and the Covenants, dalam (R. Bernhardt dan JA. Jolowicszeds), International of Human Rights, 1987.
- Makmun, Syamsuddin, Abin, Psikologi Kependidikan, Rosda Karya, Bandung, 2003.
- Malcolm D. Evans, International Law, second Edition, Oxford University Press, New York, 2006.
- Malcom N. Shaw, International Law, Six Edition, Cambridge University Press, New York, 2008.
- Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston, 2003.
- Muhammad Ashri, Hak Asasi Manusia Filosofis, Teori dan Instrumen Dasar, Sosial Politik Genius, Makassar, 2018.
- Nowak, Manfred, The Rights to Education, dalam Eide dkk, Economic, Social and Cultural Rights, Martinus Nijhoff Publishers, 1995.
- Nowak, Manfred, Hak atas pendidikan, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Buku teks revisi kedua. English, 2001.
- Organisasi Perburuhan Internasional, Menghapus Pekerja Anak Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009.

- Padmo Whyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Ghalia Indonesia, 1983.
- Padmo Wahjono, *Indonesia ialah Negara Berdasar atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, 1986.
- Panji Setijo, *Pendidikan Pancasila, Perspektif sejarah Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Prasetyo, Stanley., *Kewajiban Negara*, Jakarta, Komnas HAM, 2010.
- Ramdong Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983.
- Rhona K. M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008.
- Riza, Marwati, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, AS Publishing, Cetakan Pertama, 2009.
- Rover C, de, *Acuan Universal Penegakan HAM*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Sadjono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, laksana Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Scout, Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, 1994.
- Soelaiman, Holil, *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*, Bandung, 1980.
- Stoud, HD., dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni Bandung, 2004.
- Sugeng, Istanto, F., *Hukum Internasional*, Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 1994.
- Sugianto, *Faktor-faktor penyebab anak putus sekolah*, IQM, Rau, 2017.
- Saraswati, Rika., *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya bakti, Semarang, 2009.
- Townsend Coles 1977, dalam Supriyanto, *Pendidikan Orang Dewasa, Teori hingga Aplikasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007.
- Utrecht, E. *Pengantar Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1966.
- Wallace, Rebec M.M., *International Law*, Fourth Edition, Sweet&Maxwell London, 2002.
- Williams, Sahroon, *Public International Governing, Trans-boundry Pollution*, 13 Univ of Queensland L.J, 1984.
- Winarno, Winarno, Surachmad, *Pendidikan Nasional, Strategi dan Tragedi*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2011.
- Yoyon, Bahtiar Irinto, *kebijakan Pembaruan Pendidikan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

## B. Jurnal

- Akhmaddhian, Suwari, Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan Kuningan sebagai kabupaten konservasi, Jurnal unifikasi, Vol 2 No. S1 Januari 2015.
- Anis Zakaria Kama., Hakikat Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Asri Warman Adam, dalam artikelnya di Media Indonesia tanggal 3-9-2010.
- Asri, Muhammad, Gugatan Warga Negara dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan. *Indonesian Journal of International Law*, volume 5 Nomor 2 Tahun 2008.
- Basweda, Anies., Dalam Silatutahmi dengan para Kepala Dinas Pendidikan seluruh Indonesia, 1 Desember 2014, sebagaimana dikutip Ihsan Yasin Limpo dalam disertasinya, Tahun 2018.
- Buwono, Sri., Suatu Pendekatan Sosialisasi dan Advokasi Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Volume 2, No. 2 Oktober 2011.
- CERD (Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) 1949.
- Domince, Cristian, The International Responsibility of States for Breach of Multilateral Obligations, Oxford Journal, Ejiil, 1999.
- Disca Betty Viviansari, Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas pendidikan anak buruh migran Indonesia-Malaysia, Jurnal HAM, 2019.
- Endrawati, Netti., Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya, Studi Pada Pekerja Anak Sektor Informal di Kota Kediri, Jurnal Ilmu Hukum, Refleksi Hukum, Tahun 2011.
- Endrawati, Netty., Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Kediri, Universitas Kediri, Edisi April 2011.
- Hailu, Otake, M., Child Labour and Students Participation in primary school education in Wolaita Zone, Ethiopia, Asian Journal of Education and School Studies, 2018.
- Heru Prajitno, Vol I, No.1 Agustus 2008, Jurnal Konstitusi : *Tanggung Jawab Negara Dalam Doktrin Tindakan Negara*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Ihsan Yasin Limpo, Politik Hukum Pendidikan dasar Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Makassar, 2018.
- Joni, Muhammad, Hak-hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga, Jakarta, KPAl.

- Kamil, Mustofa, Pendidikan Non Formal, Pengembangan Melalui PKBM, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Katarina Tomasevki, Journal of Education Planning and Adminsiyrtration. Volume XXI, Nomor 4, October, 2007.
- Larasti, Penaggulangan putus sekolah dengan pelibatan orang tua, Jurnal Pendidikan Luar sekolah, 2019.
- Lestari, Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah jenjang Pendidikan Dasar (SD), Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar, 2020.
- Michael Hambunan, Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur, Lex Et Sociaties, Vol 1, Nomor 4, 2013.
- Moh.Mahfud MD sebagaimana dikutip oleh Misbahul Huda, Pengaturan Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945 dalam Perspektif Hukum Islam dan Standar Instrumen Hukum Internasional, Qiara Media Partner, Jakarta, 2016.
- Muh. Yusuf, Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945, Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Makassar, 2013.
- R. Perdana Wiratraman, Herlambang, Konstitusionalisme dan hak asasi manusia konsepsi tanggung jawab negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Yuridika, Vol 20 No 1 Januari 2005.
- Rahmad, Basuki, Partisipasi masyarakat pesisir pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar negeri 02 Marunda Jakarta Utara, Jurnal Manajemen Pendidikan, 2018.
- Safitri, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehata, Pendidikan dan Infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, 2016.
- Septiarti, Wisni, Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah, Jurnal Penelitian Hukum Humaniora, Volumen 7 Nomor 1, April 2002. P. 3.
- Shufiah, Tesis, Faktor-Faktor anak putus sekolah di desa batujaj kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, Universitas Islam Negeri Mataram, Tahun 2018.
- Sidharta, Arie., kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Lentera (Jurnal Hukum) Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3, November Tahun 2004.
- Tyaningsih Nugrahaeni, Putri, Faktor-Faktor Penyebab anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar, Jurnal Penelitian Geografis, 2018.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

KHA PBB Tahun 1989.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966.

KUHPerdata huruf a

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Konvensi ILO 138 Tahun 1979 tentang Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.

Konvensi UNESCO Tahun 1960 tentang Larangan Diskriminasi dalam pendidikan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Konvensi Hak Anak dan juga Komentar Umum yang relevan tentang Komisi Hak Anak

Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang KHA

Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990.

PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Permendkbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 157 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Bantuan BOS

#### **D. Internet**

<http://www.elsam.or.id>. diakses pada tanggal 25 Juni 2021.

<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/indeks./php/indikator/1176>.

[http://hukumonline.com/beritabaca\\_it4d3e9/Oa4502/kata-dapat-beriRuang-pemerintah-abaikan-kewajiban-konstitusi-Komersial-vs-Hak-Memperoleh-Pendidikan](http://hukumonline.com/beritabaca_it4d3e9/Oa4502/kata-dapat-beriRuang-pemerintah-abaikan-kewajiban-konstitusi-Komersial-vs-Hak-Memperoleh-Pendidikan), Selasa, 14 Mei 2021.

<https://finane.detik.com/cpns/d.5793789/kena-deh-225-peserta-cpns-ketahuan-curang-terbanyak-di-makassar/amp>. Diakses pada tanggal 3 November 2021.

<https://www.oxfam.org/en/research/towards-more-equal-Indonesia>, Diakses pada Juli 2021.

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>. Diakses 06 Agustus 2021.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019, Pedoman Penyusunan Rencana Aksi, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable Development Goals (SDGs) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.BAPPENAS, Jakarta.

Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Periode 2020-2023, Ringkasan Eksekutif Rencana Aksi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

Badan Pusat Statistik, 2020, Angka Partisipasi Murni (APM), Diakses pada tahun 2021.

Katarina Tomasevki dalam laporannya Free and Compulsory Education for All Children, The Gap between Promise and Performance..([http://www-to-education-org/content-primers/rte\\_02-pdf](http://www-to-education-org/content-primers/rte_02-pdf)).

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud Tahun 2020.

Pusat Statistik dan Penelitian Keuangan, Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan Tahun 2019.

Sumber data dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2019.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Tahun 2020.

Badan Pusat Statistik Sul-Sel Tahun 2020.

BPS, Organisasi Perburuhan Internasional, Menghapus Pekerja Anak Indonesia, Dukungan 20 Tahun, 2019.